



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB II

TELAAH LITERATUR

2.1. Pasar Modal

Menurut Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 menyatakan bahwa pasar modal adalah kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik terkait efek yang diterbitkan, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Beberapa fungsi dari pasar modal adalah sebagai berikut.

1. Sebagai sarana penambah modal bagi usaha.

Perusahaan dapat memperoleh sejumlah dana yang dapat digunakan sebagai penambah modal dalam perusahaan dengan cara menerbitkan dan menjual efek ke pasar modal. Efek tersebut dapat dibeli oleh masyarakat umum, badan usaha lainnya, lembaga, ataupun oleh pemerintah.

2. Sebagai sarana pemerataan pendapatan.

Setelah jangka waktu tertentu, perusahaan emiten dapat memberikan dividen kepada para pemegang saham. Dividen merupakan pembagian dari keuntungan yang diperoleh sesuai dengan persentase kepemilikan saham perusahaan.

3. Sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi.

Adanya tambahan modal yang diperoleh dari pasar modal akan dapat meningkatkan produktivitas perusahaan.

4. Sebagai sarana penciptaan tenaga kerja.

Keberadaan pasar modal dapat mendorong berkembangnya industri yang berdampak pada terciptanya lapangan kerja yang baru.

5. Sebagai sarana peningkatan pendapatan negara.

Dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham akan dikenakan pajak oleh pemerintah sehingga melalui pemungutan pajak ini, pemerintah dapat meningkatkan pendapatan negara.

6. Sebagai indikator perekonomian negara.

Peningkatan aktivitas dan volume penjualan/ pembelian di pasar modal, memberi indikasi bahwa aktivitas bisnis berbagai perusahaan berjalan dengan baik.

Pasar modal bertindak sebagai penghubung para investor dengan perusahaan ataupun institusi pemerintah melalui perdagangan instrumen jangka pendek ataupun panjang, seperti saham dan obligasi. Tujuan utama para investor dalam pasar modal, antara lain untuk memperoleh dividen, kepemilikan perusahaan, dan memperdagangkan saham yang dimiliki untuk memperoleh keuntungan (*gain*) saat harga sahamnya mengalami peningkatan. Harga saham lebih didominasi oleh faktor internal, seperti kondisi dan kinerja keuangan perusahaan. Adanya pengelolaan kinerja perusahaan yang efektif, perusahaan

semakin mampu untuk memperoleh laba/ keuntungan, yang akan berdampak pada meningkatnya harga saham. Investor tertarik untuk menanamkan modalnya pada perusahaan yang memiliki kinerja yang baik dan menguntungkan sehingga investor cenderung untuk memperhatikan kinerja perusahaan yang menerbitkan saham. Hal ini membuat perusahaan yang terdaftar di pasar modal untuk lebih meningkatkan kinerjanya.

2.2. Kinerja Keuangan Perusahaan

Kinerja dalam suatu perusahaan sangat berkaitan dengan tujuan utama perusahaan, yaitu meningkatkan nilai yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Menurut Ermayanti (2009 dalam Djuitaningsih dan Rahman, 2011) kinerja perusahaan sebagai gambaran mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan sehingga dapat mengetahui baik buruknya keadaan keuangan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Hal ini penting supaya sumber daya dapat digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan. Terdapat 3 (tiga) proses dalam melakukan penilaian kinerja perusahaan, yaitu perencanaan, pengendalian, dan transaksional yang dilakukan oleh *fund* manajer, eksekutif perusahaan, pemilik, kreditur, dan *stakeholder* lainnya. *Stakeholder* melakukan penilaian kinerja sebagai salah satu dasar dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kepentingan masing-masing terhadap perusahaan.

Beberapa manfaat dari penilaian kinerja perusahaan (Rudianto, 2013: 188) adalah sebagai berikut.

1. Dapat mengelola operasi organisasi secara efisien dan efektif melalui pemberian motivasi karyawan secara maksimal.
2. Membantu dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan karyawan, seperti promosi, transfer, dan pemberhentian.
3. Dapat mengidentifikasi kebutuhan pelatihan ataupun pengembangan karyawan, menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan.
4. Menyediakan umpan balik bagi karyawan atas kinerjanya yang telah dinilai oleh atasan.
5. Menyediakan suatu dasar dalam distribusi penghargaan.

Dengan melakukan penilaian kinerja, berbagai pihak yang terkait dengan perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan memperoleh manfaat nyata dari aktivitas perusahaan tersebut.

Pada dasarnya, pengukuran kinerja merupakan pengukuran perilaku manusia dalam melaksanakan perannya yang sesuai dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi (Meizaroh dan Lucyanda, 2012: 71). Pengukuran kinerja diturunkan dari visi, strategi, dan tujuan perusahaan yang harus diseimbangkan dengan ukuran *lag* dan *lead*, objektif dan subjektif, keuangan dan nonkeuangan, serta eksternal dan internal (Hansen dan Mowen, 2011: 368). Ukuran *lag* adalah ukuran hasil dari usaha di masa lalu (contoh: profitabilitas

pelanggan) dan ukuran *lead* adalah faktor penggerak kinerja masa depan (contoh: jumlah jam pelatihan karyawan). Ukuran objektif adalah ukuran yang dapat dihitung dan diverifikasi secara langsung (contoh: pangsa pasar), sedangkan ukuran subjektif sulit dihitung dan bersifat praduga (contoh: kemampuan karyawan). Ukuran keuangan dinyatakan dalam istilah moneter, sedangkan ukuran nonkeuangan menggunakan unit nonmoneter (contoh: biaya per unit dan jumlah pelanggan yang tidak puas). Ukuran eksternal terkait dengan pelanggan dan pemegang saham (contoh: kepuasan pelanggan dan pengembalian atas investasi), sedangkan internal berkaitan dengan proses dan kemampuan yang dapat menciptakan nilai bagi pelanggan dan pemegang saham (contoh: efisiensi proses dan kepuasan karyawan). Pengukuran kinerja dapat bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat pencapaian tujuan yang telah dilakukan oleh suatu organisasi, memperbaiki kinerja supaya meningkatkan kinerja yang lebih baik untuk periode selanjutnya, memberi pertimbangan sistematis dalam pembuatan keputusan untuk *reward* dan *punishment*, memotivasi karyawan dalam pencapaian sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga menghasilkan tindakan yang sejalan dengan tujuan yang akan dicapai.

Balance Scorecard merupakan suatu sistem pengukuran dan pengendalian secara cepat, tepat, dan komprehensif yang dapat memberikan pemahaman mengenai pengelolaan kinerja perusahaan yang mencakup 4 (empat) perspektif, yaitu

1. Pembelajaran dan pertumbuhan (*Learning and growth*).

Aspek pembelajaran dan pertumbuhan adalah ukuran kinerja manajemen untuk menilai seluruh upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan dan infrastruktur pendukungnya yang mencakup keahlian dan kualitas kerja. Perspektif ini mendefinisikan kemampuan organisasi untuk memperoleh pertumbuhan jangka panjang dan perbaikan. Menurut Atkinson, dkk (2012: 59), terdapat 3 (tiga) komponen dalam pembelajaran dan pertumbuhan, yaitu sumber daya manusia (keterampilan, bakat, dan pengetahuan yang sesuai dengan posisinya), teknologi informasi (sistem informasi dan aplikasi pengetahuan berkontribusi pada pelaksanaan strategi yang efektif dengan memfasilitasi perbaikan proses), serta budaya dan keselarasan organisasi (kesadaran dan pemahaman visi dan misi perusahaan, nilai-nilai budaya, keselarasan tujuan, dan berbagi pengetahuan yang relevan dengan pelaksanaan strategi).

2. Proses bisnis internal (*Internal business process*).

Aspek proses bisnis adalah ukuran kinerja manajemen yang memfokuskan perhatian pada proses bisnis internal yang mendorong bisnis perusahaan yang mencakup siklus waktu, siklus pengiriman, dan siklus keefektifan. Menurut Atkinson, dkk (2012: 57), proses bisnis internal dapat diidentifikasi dengan cara: (1) pengelolaan operasi dalam memproduksi barang/ jasa dan menyampaikan produk kepada pelanggan, (2) pengelolaan pelanggan dengan memperluas dan menjalin hubungan yang baik, (3) proses inovasi/

mengembangkan proses dan barang/ jasa baru, serta (4) proses regulasi dan sosial yang ditentukan dari beberapa dimensi penting, yaitu lingkungan, kesehatan dan keamanan, praktik kerja, dan investasi masyarakat.

3. Pelanggan (*Customer*).

Aspek pelanggan adalah ukuran kinerja manajemen yang terkait dengan upaya untuk mendapatkan kesuksesan dari pelanggan yang ditargetkan dengan terus meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan, termasuk pangsa pasar yang mencakup jumlah pelanggan baru, dan kecepatan layanan waktu pelanggan.

4. Keuangan (*Financial*).

Aspek keuangan adalah ukuran kinerja manajemen yang terkait dengan hasil tertinggi yang dapat diberikan kepada pemegang saham perusahaan, mencakup berkurangnya biaya secara signifikan, penggunaan aset, dan imbal hasil investasi dalam suatu perusahaan. Ukuran kinerja keuangan, seperti laba operasi dan laba atas investasi, menunjukkan apakah strategi perusahaan dan pelaksanaan operasi dapat meningkatkan nilai pemegang saham (Atkinson, dkk, 2012: 50). Kinerja keuangan perusahaan dapat membaik dengan dua pendekatan dasar, yaitu peningkatan produktivitas dan pertumbuhan pendapatan.

Balance Scorecard adalah kartu skor yang digunakan untuk mengukur kinerja dengan memperhatikan keseimbangan antara sisi keuangan dan nonkeuangan secara jangka pendek dan jangka panjang dengan melibatkan faktor internal dan eksternal (Rangkuti, 2014: 3).

Dengan sistem pengukuran *Balance Scorecard*, perusahaan dapat menelusuri hasil keuangan dan memantau pengukuran nonkeuangan lainnya, seperti pelanggan, proses, karyawan, dan sistem untuk pertumbuhan di masa depan (Atkinson, dkk, 2012: 44). Berdasarkan konsep *Balance Scorecard*, sebenarnya kinerja keuangan merupakan akibat ataupun hasil dari kinerja nonkeuangan (proses bisnis, pelanggan, dan pembelajaran). Perbaikan pada ketiga indikator nonkeuangan tersebut harus mengarah pada kinerja keuangan yang lebih baik di masa depan. Menurunnya indikator nonkeuangan (seperti kepuasan dan loyalitas pelanggan, kualitas proses, dan motivasi karyawan) secara umum dapat menurunkan kinerja keuangan di masa depan.

Menurut Setiawan dan Ahalik (2014: 103), pengukuran kinerja dengan *Balance Scorecard (BSC)* juga tidak terlepas dari strategi perusahaan yang ditetapkan pertama kali, misalnya perusahaan menggunakan strategi *cost leadership* (strategi biaya dan harga jual yang murah) atau *differentiation* (strategi diferensiasi barang/ jasa yang sifatnya unik) maka akan tercermin di dalam penerapan *BSC*. *Balance Scorecard* kini telah terintegrasi dengan seluruh sistem pengukuran kinerja yang bersifat operasional sehingga menjadi sistem strategi manajemen mulai dari formulasi strategis sampai pada implementasi operasional kegiatan setiap individu untuk mencapai tujuan perusahaan.

Dalam menilai kinerja perusahaan, salah satu kriteria penting yang digunakan adalah kinerja keuangan perusahaan. Kinerja keuangan merupakan hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh manajemen perusahaan dalam

menjalankan fungsinya mengelola aset perusahaan secara efektif selama periode tertentu (Rudianto, 2013: 189). Informasi keuangan yang dihasilkan dari proses akuntansi dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan manajemen. Penilaian terhadap kinerja keuangan sangat dibutuhkan untuk dapat mengetahui dan mengevaluasi tingkat keberhasilan perusahaan berdasarkan aktivitas keuangan yang telah dilaksanakan perusahaan. Menurut Djuitaningsih dan Rahman (2011: 159), performa keuangan yang baik merupakan salah satu tujuan utama perusahaan, terutama pada perusahaan komersial dikarenakan performa keuangan akan berpengaruh terhadap banyak hal, di antaranya adalah nilai perusahaan, harga saham, dan kompensasi yang akan diterima oleh manajemen perusahaan. Para pemegang saham melakukan penilaian kinerja keuangan untuk mengetahui efektivitas kinerja dari manajemen perusahaan yang merupakan representasi pihak manajemen tersebut dalam perusahaan. Pengukuran kinerja keuangan dalam perusahaan dilakukan untuk mengetahui apakah hasil yang dicapai telah sesuai dengan perencanaan (Wati, 2012: 2). Kinerja keuangan perusahaan dapat tercermin dalam pelaporan keuangan sehingga kinerja dapat diukur dengan menganalisis laporan keuangan perusahaan.

Melakukan interpretasi atau analisis laporan keuangan suatu perusahaan akan sangat bermanfaat bagi para analis untuk dapat mengetahui keadaan dan perkembangan kinerja keuangan perusahaan yang dianalisa. Selain pimpinan perusahaan, manajemen, atau kreditor, para investor pun juga berkepentingan terhadap laporan keuangan suatu perusahaan dalam rangka penentuan

kebijaksanaan penanaman modalnya. Investor akan memperhatikan *rate of return* atas dana yang akan atau telah diinvestasikannya dalam perusahaan. Investor yang ingin menanamkan modalnya dalam bentuk saham suatu perusahaan tentu akan mempertimbangkan kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dan kemampuan perusahaan memberikan pengembalian (*return*) sesuai tingkat yang diharapkan oleh para investor. Investor akan senantiasa menganalisis laporan keuangan perusahaan sebelum mengambil keputusan untuk berinvestasi.

Pengukuran kinerja perusahaan yang dilakukan dari aspek keuangan, dapat menggunakan analisa rasio, salah satunya adalah profitabilitas. Menurut Nuswandari (2009: 74), kinerja perusahaan ditinjau dari perspektif keuangan memiliki tipikal dihubungkan dengan profitabilitas. Informasi kinerja entitas, terutama profitabilitas diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa depan (IAI, 2012). Informasi kinerja bermanfaat untuk memprediksi kapasitas entitas dalam menghasilkan arus kas dari sumber daya yang ada dan berguna dalam perumusan pertimbangan mengenai efektivitas entitas dalam memanfaatkan tambahan sumber daya. Profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (Setiawan dan Ahalik, 2014: 97).

Organisasi sektor swasta (privat) cenderung berorientasi pada pencapaian keuntungan (*profit*) sehingga kinerja lebih diukur dengan rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas mengukur efektivitas perusahaan dalam mengelola kegiatan operasional. Para investor yang akan menginvestasikan dananya ke dalam

perusahaan cenderung memperhatikan profitabilitas perusahaan sehingga rasio profitabilitas dapat menjadi gambaran tingkat pengembalian atau keuntungan yang diperoleh investor atas investasinya.

Kinerja keuangan perusahaan dalam penelitian ini diproksikan dengan *Return on Equity (ROE)*. *ROE* merupakan salah satu alternatif alat analisis keuangan untuk mengukur profitabilitas. *ROE* dapat digunakan sebagai rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan efektivitas perusahaan dalam mengelola ekuitasnya sendiri sehingga memperlihatkan tingkat keuntungan dari investasi yang telah dilakukan oleh pemilik modal sendiri ataupun pemegang saham perusahaan (Meizaroh dan Lucyanda, 2012: 71). Perusahaan yang mampu untuk menghasilkan laba yang besar bagi pemegang saham supaya tercapainya tingkat pengembalian yang diharapkan oleh pemegang saham tersebut dapat tercermin dari nilai *ROE* yang semakin besar. *ROE* menjadi salah satu rasio profitabilitas yang sangat penting bagi para investor karena dapat mengukur kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba bersih dari penggunaan ekuitas perusahaan secara efisien.

Ekuitas sebagai salah satu unsur yang berkaitan langsung dengan pengukuran posisi keuangan. Dalam Standar Akuntansi Keuangan per 1 Juni 2012 (IAI, 2012), ekuitas adalah hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua liabilitas. Ekuitas perusahaan dapat disubklasifikasikan dalam laporan posisi keuangan, misalnya dalam perseroan terbatas, setoran modal oleh para pemegang saham, saldo laba awal periode (*Retained Earnings*), penyisihan

saldo laba dan penyisihan atas penyesuaian pemeliharaan modal yang masing-masing disajikan secara terpisah. Klasifikasi semacam itu dapat menjadi relevan untuk kebutuhan pengambilan keputusan pengguna laporan keuangan. Klasifikasi tersebut juga dapat merefleksikan fakta bahwa pihak-pihak dengan hak kepemilikannya masing-masing dalam perusahaan mempunyai hak yang berbeda dalam hubungannya dengan penerimaan dividen atau pembayaran kembali modal. Pembentukan cadangan diharuskan untuk memberi perlindungan tambahan kepada perusahaan dan para kreditornya terhadap kerugian yang ditimbulkan.

Nilai *ROE* yang tinggi berarti perusahaan semakin mampu dalam mengelola ekuitasnya untuk memperoleh laba bersih. Perolehan laba bersih akan mencerminkan kinerja keuangan perusahaan yang baik dan berdampak pada kenaikan harga saham perusahaan.

2.3. Good Corporate Governance

Adanya kompleksitas dan tekanan persaingan bisnis yang dihadapi perusahaan, menjadikan tata kelola perusahaan (*corporate governance*) sebagai topik utama dalam bisnis global. *Corporate governance* merupakan suatu mekanisme pengendalian dalam mengatur, mengawasi, dan mengelola perilaku manajer dalam perusahaan supaya kemakmuran dan akuntabilitas perusahaan dapat tercapai dan mewujudkan nilai pemegang saham. Kerangka yang dibangun dalam tata kelola perusahaan harus menjamin adanya pedoman strategis perusahaan, pengawasan yang efektif terhadap manajemen oleh dewan komisaris, dan pertanggungjawaban

dewan komisaris terhadap perusahaan dan pemegang saham. *Corporate governance* juga mensyaratkan adanya struktur perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja (Riandi dan Siregar, 2011: 128).

Tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) sangat penting agar perusahaan dapat memerankan diri sebagai entitas yang bertujuan untuk meraih kesejahteraan ekonomi, mencapai dan meningkatkan kesejahteraan sosial, termasuk lingkungan alam (Warsono, Amalia, dan Rahajeng, 2009: 2). Bank Dunia (*World Bank*) mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham ataupun masyarakat sekitar secara keseluruhan (Effendi, 2009: 2).

Dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG, 2006) menyatakan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) mengandung 5 (lima) asas, yaitu

1. Keterbukaan (*transparency*).

Adanya keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi materil yang relevan mengenai perusahaan. Perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah untuk diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan demi menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis. Perusahaan juga harus

mengambil inisiatif untuk mengungkapkan masalah yang disyaratkan dalam peraturan perundang–undangan dan hal yang penting dalam pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Akuntabilitas (*accountability*).

Kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban manajemen perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif dan ekonomis. Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu, perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. Responsibilitas (*responsibility*).

Kesesuaian pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang–undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat. Perusahaan harus mematuhi segala peraturan perundang–undangan dan melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat serta lingkungan untuk memelihara kesinambungan usaha jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4. Independensi (*independency*).

Suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa konflik kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat. Kelancaran dalam pelaksanaan asas *GCG* ditentukan dari pengelolaan perusahaan secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Organ perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi, yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan *GCG* secara efektif.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*fairness*).

Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul sebagai akibat dari perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Keadilan adalah kesetaraan perlakuan dari perusahaan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan kriteria dan proporsi yang seharusnya.

Efektivitas tata kelola perusahaan yang baik dapat dinilai dari seberapa jauh sistem mampu untuk memberikan hasil tata kelola (*governance outcomes*) yang diharapkan.

Penerapan sistem tata kelola perusahaan dapat berbeda-beda di setiap perusahaan, tergantung dari mekanisme pemilik perusahaan yang memengaruhi manajer. Mekanisme *good corporate governance*, dapat berasal dari luar dan dalam perusahaan, antara lain dewan komisaris, komite audit, dan pemegang saham. Fungsi dan pihak yang terkait dalam penerapan *corporate governance* adalah sebagai berikut (Warsono, Amalia, dan Rahajeng, 2009: 5):

1. *Oversight*. Perhatian secara bertanggung jawab oleh *Board of Directors* (Dewan Direksi) supaya penerapan *corporate governance* selalu memperoleh perhatian utama, dan jika terjadi kegagalan, harus ada pertanggungjawaban yang jelas.
2. *Enforcement*. Penegakan oleh *Chief Executive Officers* (Pejabat Eksekutif) supaya penerapan *corporate governance* ditegakkan berdasar pada prinsip-prinsip dasar.
3. *Advisory*. Pemberian saran oleh *Boards of Commissions/ Committees* (Dewan Komisaris/ Komite) supaya penerapan *corporate governance* dilakukan berdasar pertimbangan yang hati-hati terutama melalui keterlibatan pihak eksternal yang independen.
4. *Assurance*. Penjaminan oleh Auditor (Pemeriksa) supaya penerapan *corporate governance* dievaluasi dan diuji berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.
5. *Monitoring*. Pemantauan oleh *Stakeholders* (Para pemangku kepentingan) supaya penerapan *corporate governance* dipantau oleh pihak-pihak terkait

yang terlibat dalam operasi perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Suatu perusahaan yang dikelola dengan baik, memiliki kemungkinan besar sistem manajemen lingkungan, dialog, dan perjanjian yang baik dengan para pemangku kepentingan. Implementasi *GCG* diharapkan bermanfaat untuk menambah dan memaksimalkan nilai perusahaan (Retno dan Priantinah, 2012: 85).

2.3.1. Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris merupakan inti dari *Corporate Governance* (*CG*) yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, dan mewajibkan terlaksananya akuntabilitas (Yendrawati dan Nugroho, 2012: 189). Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/ atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.

Dalam menjalankan tata kelola perusahaan yang baik, setiap perusahaan harus memiliki komisaris independen sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia (2006) menyatakan bahwa jumlah dewan komisaris harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan dan jumlah dewan komisaris independen harus menjamin pengawasan telah berjalan dengan efektif sesuai perundang-undangan yang berlaku. Salah satu dari komisaris independen harus mempunyai latar belakang akuntansi atau

keuangan. Menurut Sulistyanto (2008 dalam Agustia, 2013), dewan komisaris independen bertugas dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki strategi bisnis yang efektif (memantau jadwal, anggaran, dan efektivitas strategi), mematuhi hukum dan perundangan yang berlaku, serta menjamin bahwa prinsip-prinsip dan praktik *GCG* telah dipatuhi dan diterapkan dengan baik. Jumlah komisaris independen semakin besar atau dominan, dapat memberikan kekuatan (*power*) kepada dewan komisaris untuk menekan pengelolaan dalam rangka meningkatkan kualitas perusahaan. Dewan komisaris independen dapat mendorong dewan komisaris untuk bertindak secara objektif dan mampu untuk melindungi seluruh *stakeholder* perusahaan. Dalam penelitian ini, komposisi dewan komisaris dapat diukur berdasarkan persentase jumlah anggota dewan komisaris independen terhadap seluruh anggota dewan komisaris sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut (Susanti, 2011).

$$DKI = \frac{\sum \text{dewan komisaris independen}}{\sum \text{anggota dewan komisaris}} \times 100\%.$$

Semakin banyaknya dewan komisaris yang independen dalam suatu perusahaan, pengawasan terhadap dewan direksi dapat dilaksanakan secara optimal sehingga diharapkan semakin mampu untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Pengaruh dewan komisaris independen terhadap kinerja keuangan perusahaan memiliki hasil yang beragam. Penelitian Shungu, Ngirande, dan Ndlovu (2014) yang meneliti pada perusahaan *commercial bank* di Zimbabwe

tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, menyatakan bahwa komposisi dewan memiliki pengaruh positif terhadap kinerja bank komersial. Namun, penelitian Septiputri dan Mutmainah (2013) yang meneliti pada perusahaan perbankan syariah Indonesia tahun 2007 sampai tahun 2011 menyatakan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh positif, tetapi tidak signifikan terhadap *ROE*.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah membuktikan hubungan komposisi dewan komisaris independen dengan kinerja keuangan perusahaan, maka hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah

H_{a1} : *Good Corporate Governance* yang diprosikan dengan dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diprosikan dengan *Return on Equity (ROE)*.

2.3.2. Komite Audit

Manajemen perusahaan memerlukan jasa pihak ketiga agar dapat meningkatkan kepercayaan pihak eksternal perusahaan terhadap pertanggungjawabannya. Begitu pula sebaliknya, pihak eksternal perusahaan memerlukan jasa pihak ketiga untuk meyakinkan dirinya bahwa laporan keuangan yang disajikan manajemen dapat dipercaya sebagai dasar dalam pengambilan keputusan (Yendrawati dan Nugroho, 2012: 189). Pihak ketiga tersebut adalah komite audit. Dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia (2006), komite audit (*Audit Committee*) sebagai salah satu komite yang dapat menunjang dewan komisaris dan harus dapat dipastikan bahwa komite audit menjalankan fungsinya dengan baik. Komite

audit dibentuk oleh dewan komisaris dan anggotanya terdiri dari komisaris serta pihak luar yang independen dan memiliki keahlian, pengalaman, dan kualitas lain yang diperlukan.

Komite audit harus menjalankan tugasnya berdasarkan tata tertib dan prosedur operasional baku yang ditentukan bersama dengan dewan komisaris. Struktur dan keanggotaan komite audit dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor IX.I.5 mengatur bahwa sebagian besar anggota komite audit adalah komisaris independen dan anggota lainnya merupakan pihak luar emiten dan perusahaan publik. Salah satu komisaris independen yang menjadi anggota komite audit bertindak sebagai ketua komite audit.

Keberadaan komite audit ini penting dalam menerapkan *Good Corporate Governance (GCG)* di mana *GCG* merupakan suatu konsep untuk meningkatkan kinerja perusahaan yang baik supaya dapat tercapai pengelolaan yang transparan. Dalam penelitian ini, komite audit diukur berdasarkan jumlah anggota komite audit dalam perusahaan sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut (Susanti, 2011).

$$KA = \sum \text{komite audit dalam perusahaan}$$

Keberadaan komite audit diharapkan dapat memperbaiki citra dan nilai perusahaan, meningkatkan transparansi laporan keuangan, dan meningkatkan kredibilitas informasi dalam pelaporan keuangan perusahaan sehingga kinerja keuangan perusahaan dapat lebih baik.

Penelitian Purnomosidi, dkk. (2014) pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Artinya semakin banyak komposisi komite audit, kinerja keuangan akan dapat terawasi dengan baik sehingga kinerja keuangan perusahaan dapat meningkat. Berdasarkan penelitian sebelumnya mengenai komite audit independen terhadap kinerja keuangan perusahaan, maka hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah

Ha₂: *Good Corporate Governance* yang diproksikan dengan komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diproksikan dengan *Return on Equity (ROE)*.

2.3.3. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak institusi atau lembaga, seperti bank, perusahaan investasi, perusahaan asuransi, dan kepemilikan institusi lainnya (Ardianingsih dan Ardiyani, 2010: 98). Kepemilikan institusi dapat berperan sebagai agen pengawas yang penting dalam melakukan pengawasan manajemen sehingga dapat mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen dan menjamin kemakmuran untuk pemegang saham (Ardianingsih dan Ardiyani, 2010: 98). Keterlibatan pihak institusi dengan memiliki saham perusahaan dapat memotivasi pihak manajer untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan dan berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan.

Penciptaan nilai bagi pemangku kepentingan dengan memfokuskan perhatian pada usaha memaksimalkan nilai bagi komunitas lokal, karyawan, dan dampak lingkungan dapat dipandang sama (sinonim) dengan menciptakan nilai keuangan bagi pemegang saham. Mengabaikan kebutuhan pemangku kepentingan dapat menurunkan kinerja keuangan bahkan menyebabkan kegagalan perusahaan. Perhitungan kepemilikan institusional dapat dirumuskan sebagai berikut (Amyulianthy, 2012).

$$KI = \frac{\sum \text{saham yang dimiliki institusi}}{\sum \text{saham yang beredar}} \times 100\%$$

Penelitian Susanti (2011) yang meneliti pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2003 sampai dengan tahun 2006 membuktikan bahwa kepemilikan institusi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, maka hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini adalah

Ha₃: *Good Corporate Governance* yang diproksikan dengan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diproksikan dengan *Return on Equity (ROE)*.

2.4. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan menggambarkan kemampuan finansial perusahaan dalam suatu periode tertentu. Menurut Kamaliah, Akbar, dan Kinanti (2009: 13), ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang mengklasifikasikan besar kecilnya perusahaan yang dapat diukur dengan berbagai cara, yaitu total aset, *log size*, nilai pasar saham, jumlah penjualan bersih, dan lain-lain. Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan diukur dari besarnya total aset yang dimiliki perusahaan. Aset menunjukkan suatu aktiva dalam aktivitas operasional perusahaan. Total aset yang meningkat akan meningkatkan hasil operasi yang berdampak pada kinerja keuangan yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya ke dalam perusahaan. Ukuran perusahaan dapat diukur dengan logaritma natural (Ln) dari total aset perusahaan. Perhitungan total aset dengan menggunakan logaritma natural supaya menghindari data yang tidak normal karena besarnya total aset yang berbeda-beda di setiap perusahaan dan memiliki selisih nilai yang besar sehingga menyebabkan nilai total aset yang ekstrim. Ukuran perusahaan dapat dirumuskan sebagai berikut (Kamaliah, Akbar, dan Kinanti, 2009).

$$UP = \text{Logaritma natural (Ln) Total Aset}$$

Hasil penelitian sebelumnya mengenai ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan, yaitu penelitian Kamaliah, Akbar, dan Kinanti (2009) yang meneliti pada perusahaan *wholesale* dan *retail trade* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 telah berhasil membuktikan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas perusahaan yang diproksikan dengan *Return on Equity (ROE)*. Berdasarkan penelitian sebelumnya, maka hipotesis keempat yang diajukan dalam penelitian ini adalah

Ha₄: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diproksikan dengan *Return on Equity (ROE)*.

Perwujudan tata kelola perusahaan yang baik dapat meningkatkan transparansi laporan keuangan sehingga meningkatkan pencitraan dan nilai perusahaan tersebut. Demi mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik, adanya dewan komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional, serta ukuran perusahaan diharapkan dapat menaikkan kinerja keuangan perusahaan.

Penelitian sebelumnya, yakni penelitian Wati (2012), Windah dan Andono (2012) pada perusahaan yang telah menerapkan *GCG* tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan *Return on Equity (ROE)*. Oleh karena itu, hipotesis kelima yang diajukan dalam penelitian ini adalah

Ha₅: *Good Corporate Governance* yang diproksikan dengan komposisi dewan komisaris, komite audit, dan kepemilikan institusional, serta ukuran perusahaan

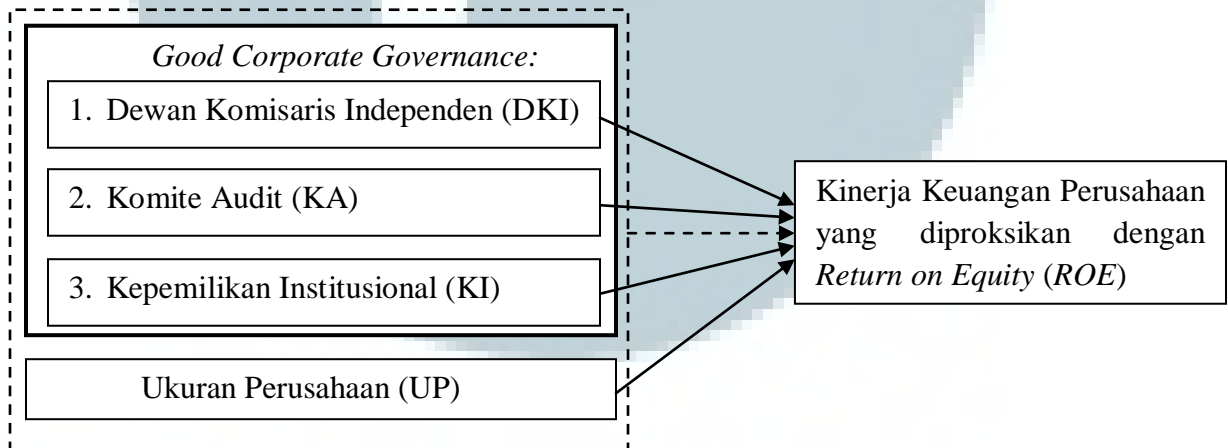
secara simultan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diproksikan dengan *Return on Equity (ROE)*.

2.5. Kerangka Penelitian

Berdasarkan hipotesis yang telah diajukan sebelumnya, maka disusunlah kerangka penelitian sebagai berikut.

Tabel 2.1

Kerangka Penelitian



UMMN